

**SIARAN PERS**  
**Nomor: 02/LBHP-PM/V/2023**

*“Empat Bulan Tragedi Mappi Berdarah namun Majelis Rakyat Papua hanya Tinggal Diam : Keadilan Bagi Orang Asli Papua Terancam Diatas Tanahnya Sendiri”*

Peristiwa penembakan terhadap 9 (Sembilan) Orang Asli Papua pada tanggal 14 Desember 2022, di Kilometer 2 Kota Kepi, Kabupaten Mappi, Provinsi Papua Selatan, hingga kini belum ada tanda-tanda kehadiran negara khususnya Majelis Rakyat Papua sebagai Lembaga Kultural dalam memperjuangkan dan memproteksi Hak-Hak orang asli Papua.

Untuk diketahui bahwa dalam kejadian Tragedi Mappi Berdarah, ada 9 (Sembilan) warga sipil yang kesemuanya adalah Orang Asli Papua menjadi korban baik korban luka-luka dan korban meninggal. Berdasarkan data 1 (satu) orang korban meninggal dunia bernama Moses Nakas Erro (32) Meninggal Dunia di RSUD Mapi sementara 8 (delapan) Korban Luka-Luka lainnya yaitu 1. Sabinus Sokmi Sedap (14), 2. Otnie Qah Samagoi (25), 3. Basilius Bape Yebo (24), 4. Rexon Y.A. Pasim (18), 5. Kaspar Khani Yebo (15), 6. Wilhelmus Jeji Samagoi (18), 7. Yohanes T. Sedap (24) dan 8. Ferdinandus Boy (16). Atas dasar kondisi jumlah korban tersebut sehingga Peristiwa dikenang sebagai Tragedi Mappi Berdarah 14 Desember 2022.

Menurut Niko Imbanop selaku Kepala Divisi Sipil dan Politik LBH Papua Pos Merauke bahwa “Dalam Investigasi Koalisi Penegak Hukum dan HAM Papua menunjukkan tidak ada bentrok antara dua kelompok masyarakat, melainkan aparat diduga bertindak represif dengan cara menembak ke arah masyarakat sipil sehingga jatuh korban warga sipil. Yang di duga pelaku adalah oknum anggota Polisi dan oknum anggota TNI”.

Lebih lanjut Niko meyakini bahwa sejak tanggal 9 Januari 2023, Pihak Koalisi Penegakan Hukum dan HAM Papua telah memasukan pengaduan kepada Majelis Rakyat Papua, namun sampai sekarang Majelis Rakyat Papua belum merespon ataupun mengambil langkah-langkah sesuai dengan tugas badan tersebut. “Atas kondisi tersebut kami mempertanyakan Kinerja MRP dalam mengimplementasikan tugas dan kewenangan MRP khususnya terkait “memperhatikan dan menyalurkan aspirasi, pengaduan masyarakat adat, umat beragama, kaum perempuan, dan masyarakat pada umumnya yang menyangkut hak-hak Orang Asli Papua, serta memfasilitasi tindak lanjut Penyelesaiannya” sesuai dengan sebagaimana diatur pada Pasal 20 ayat (1) huruf f, UU No. 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua dalam kasus yang menimpa 9 (Sembilan) Orang Asli Papua yang menjadi korban Penembakan” menurutnya.

Niko menambahkan, semestinya setelah MRP menerima pengaduan langsung membentuk Tim untuk turun melakukan penyelidikan lanjutan dilapangan dan juga bisa memanggil para pihak atas dugaan pelanggaran HAM yang terjadi di Mappi

Dengan melihat sikap diam dan pasif tersebut maka dengan menggunakan kewenangan “Setiap orang, kelompok, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, atau lembaga kemasyarakatan lainnya, berhak berpartisipasi dalam perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia” sebagaimana diatur pada Pasal 100, UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Kepada Divisi Sipil dan Politik LBH Papua Pos Merauke mendesak :

1. Majelis Rakyat Papua dilarang tinggal diam tetapi segera membentuk Tim Investigasi terkait kasus penembakan 14 Desember 2022 sesuai perintah Pasal 20 ayat (1) huruf f, UU No. 2 Tahun 2021.
2. Majelis Rakyat Papua Jika mengalami kesulitan dalam Investigasi bisa melakukan kerja sama dengan pihak Koalisi Penegakan Hukum dan HAM selaku Kuasa Hukum 9 (Sembilan) Orang Asli Papua yang menjadi korban Penembakan untuk membuat jelas kasus ini.
3. Majelis Rakyat Papua harus menunjukkan kerja-kerja serta seriusan dalam pembelaan dan proteksi terhadap orang Papua, salah satunya dengan menunjukkan kehadiran MRP dalam kasus Mappi Berdarah 14 Desember 2022.

Demikian siaran pers ini dibuat, semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian disampaikan terima kasih. Hormat Kami Lembaga Bantuan Hukum Papua Pos Merauke.

Merauke, 10 April 2023

Hormat Kami  
LBH Papua Pos Merauke

*Narahubung :*  
*081391649004 (Nikolaus Kombanop)*  
*082397750203 (Arnoldus Anda)*